

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Buol, dikaji dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi telah dilaksanakan oleh DPRD sebagai salah satu fungsi yang melekat dalam diri dalam pengelolaan APBD Kabupaten Buol namun belum optimal, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya bidang pembangunan jalan, terutama jalan yang ada dalam perkotaan serta jalan-jalan kantong produksi sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan perekonomiannya, karena jalan kantong produksi sangat dibutuhkan bagi masyarakat petani, dan produk pembentukan kebijakan yang menjadi tanggungjawab dari Komisi-komisi yang harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terkait dengan OPD teknis sebagai pelaksana dan Bapemperda DPRD sebagai pembentuk produk kebijakan.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Buol dikaji dari aspek: a). Komunikasi, b). Sumber Daya, c). Disposisi, d). Struktur birokrasi telah dilaksanakan akan tetapi masih belum optimal karena sumber daya yang dimiliki anggota DPRD masih minim, khususnya pada latar belakang pendidikan sehingga berimplikasi pada

cara pandang/penilaian terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengelolaan APBD

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD perlu dioptimalkan kembali, dan terjalinnya Kerjasama antar eksekutif, legislative dan yudikatif dalam menangani persoalan yang terjadi di lapangan
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia bagi anggota DPRD sebagai salah satu penunjang dalam mengevaluasi segala bentuk permasalahan yang mungkin akan terjadi, seperti Pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD, Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan berdasarkan regulasi yang berlaku, serta Diklat dan workshop lainnya yang tujuannya untuk lebih memaksimalkan tingkat fungsi pengawasan dan memberikan nilai positif untuk peningkatan sumber daya yang ada di DPRD Kabupaten Buol.
3. Dalam hal kebijakan, Pemerintah Daerah perlu mengklasifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta produk kebijakan yang dibuat senantiasa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan daya dukung masyarakat, agar program kebijakan yang dihasilkan memberikan output yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc
- Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jilid 1. Edisi ke Sembilan Salemba Empat: Jakarta
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwight Waldo. 1963. *The Study of Public Administration*. Random House: New York.
- Dwiyanto, Agus, 2020. *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2018 *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto. Agus, 2015. *Administrasi Publik (Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara)*. Gadjah Mada University Press dan LANRI, Yogyakarta.

- Dunn, William, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik cetakan kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fayol Hendry. 2013. *Pengantar Administrasi dan fungsi-fungsi manajemen*
- Gibson I. 1988. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (terjemahan Djoerban Wahid). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- George R.Terry., dan Leslie.W.Rue, 1988. *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara,.
- Harbani Pasolong, 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.Bandung
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston
- Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media,
- Kencana, Syafiie Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Kuhn Thomas S. 2002. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*: Bandung PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2007. *Akuntansi Biaya*, Edisi ke 3. Yogyakarta: STIE YKPN
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Robbins, S. 2008. *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II. alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
- Siagian, 2019, *Filsafat Administrasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi aksara.
- Simon, Herbert A. 1999. *Administrative Behaviour (Perilaku Administrasi)*. Alih Bahasa St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tahir, Arifin, 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. Bandung
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal

- Anandya, R., dkk. 2017. *Undang-Undang Republik Fraksi Gerindra , Fraksi Partai yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam masa periode 2014-2019 ? Dan apakah.* 6, 1–11.
- Abdurrohman, Y. 2019. *Duties And Functions Within Parliament To Improve The Welfare Of The People As Autonomy Realization In District Of Blora.* 2(3), 375–382.
- Ferdinandus, M. S. 2020. International Journal of Education , Information Technology and Others (Ijeit). *International Journal of Education, Information Technology and Others (Ijeit)*, 2(1), 278–285.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3517818>
- GOPAC, UNDP, & IDB. 2017. *Parliament's Role in Implementing the Sustainable Development Goals.* 64.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/parliamentary_development/parliament-s-role-in-implementing-the-sustainable-development-go.html
- Hamdan, dkk. 2019. *Impact of Human Capital Development and Human Capital Isolation Mechanisms on Innovative Performance: Evidence from Industrial Companies in Jordan.* 11(15), 68–74. <https://doi.org/10.7176/EJBM>.
- Hidayah, A., & Wati, E. P. 2009. *Relationship Of Regional Representative Council With State Institutions In The System Of Constitutional In Indonesia.* 12–19.
- Iskandar, I., & Nasroen, J. 2018. Monitoring Function of DPRD Toward Implementation of the Regional Budget Regulation Bulungan Regency 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(1).
<https://doi.org/10.18196/jgpp.5190>.
- Levy, S. 2019. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Regional House of Representatives (DPRD) Supervision of the Implementation of the Bukittinggi City Regional Regulation Regarding Public Roadside Parking.* 205–215.
- Musliamin, dkk. 2020. The Performance of the Regional People's Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting Functions in Bone Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 93. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1928>
- Nwogwugwu, N., & Ishola, A. 2019. Legislators and their Oversight Functions in Policy Implementation in Nigeria. *International Journal of Humanities, Social*

Sciences and Education, 6(3), 93–102. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0603011>

Saragih, B. 2019. *The Implementation of Monitoring Function of the Regional Legislative Assembly (DPRD) Medan in Medan Development Planning*.

Saputri, dkk. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.18332>

Syam, A. S. C. 2018. The Implementation of The Supervisory Functions of The Regional House of Representatives Against The Implementation of The Budget of Regional Maros, 23(5), 65–71. <https://doi.org/10.9790/0837-2305056571>

Syam, F., Funny, R., & Elita, M. (2020). *Legislative Humane Activities During the Pandemic in Indonesia : Genuine Concern or Political Imaging ?* 14(3), 32–43.

Tampubolon, M. H. R. (2017). *A Socio-Legal Analysis of the Control Function of Parliament in the Regulation Implementation*. 59, 220–241.

Wasahua, dkk. 2020. *Function of Supervisory Board of People's Regional Representatives Regarding Registration on Free Education in South Sulawesi*, 25(7), 22–36. <https://doi.org/10.9790/0837-2507082236>.

Artikel

Minogue, M., Polidano, C. & Hulme, D. 1998. *Beyond the New Public anagement : Changing Ideas and Practices in Governance*. Edward Elgar, Cheltenham, UK, OECD. 1998. Business Sector Advisory Group on Corporate Governance.

Sumber Lainnya:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat provinsi, Kab, dan Kota

Tata Tertib DPRD Kab. Buol No 2 tahun 2019